



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Berita Acara Pemeriksaan dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan Bawang Merah Berdasarkan Pasal 372 (KUHP)

Finsensius Samara¹, Angelita Fransina Natalia Longa², Fridolinus Richard Fahik³,
Magdalena Monika Miranda Ndolu⁴, Richard Andrian Radja⁵, Jesis Mireva Celeste
Moa Dacosta⁶

¹Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, finsensamaral6@gmail.com

²Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, angelitalonga07@gmail.com

³Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, fridolinusrichardfahik@gmail.com

⁴Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, mirandandolu01@gmail.com

⁵Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, Yayasanlapernas@gmail.com

⁶Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, jessismoadacosta@gmail.com

Corresponding Author: finsensamaral6@gmail.com¹

Abstract: *Embezzlement is a common crime that often occurs in the business context, including the case of Demsi Ronald Dully alias Demsy against Anung Satya Martani based on the Additional Investigation Report (BAP) and police report number: LP/B/331/IX/2023/SPKT Polda NTT. This study analyzes the elements of the crime of embezzlement according to Article 372 of the Criminal Code, the validity of the BAP as evidence, and its legal enforcement. A normative juridical approach is used with primary data sources from the BAP and secondary data from laws and regulations. The results of the analysis show that the subjective elements (malicious intent) and objective (unlawful control of another person's property) are fulfilled, but there is an overlap with civil defense, qualifying the act as embezzlement with a maximum criminal penalty of 4 years in prison. The BAP is proven valid as initial evidence even though it needs to be supported by additional evidence, with the involvement of witnesses and a lawsuit letter strengthening the chronology of events between May 26, 2023 to July 12, 2023 in Kupang. Legal implications include the potential for settlement through civil channels as well as recommendations for improving the preparation of the BAP to ensure legal certainty. This research contributes to criminal penalties in protecting businesses in Indonesia.*

Keyword: *Embezzlement, Article 372 of the Criminal Code, legal analysis, civil documents, minutes of examination.*

Abstrak: Penggelapan merupakan tindak pidana umum yang sering terjadi dalam konteks bisnis, termasuk kasus Demsi Ronald Dully alias Demsy terhadap Anung Satya Martani berdasarkan BAP Tambahan dan laporan polisi nomor : LP/B/331/IX/2023/SPKT Polda NTT. Penelitian ini menganalisis unsur-unsur delik penggelapan sesuai pasal 372 KUHP, validitas

BAP sebagai bukti,serta penegakan hukumnya.pendekatan yuridis normatif digunakan dengan sumber data primer dari data BAP dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukan bahwa unsur subjektif (niat jahat)dan objektif (penguasaan barang milik orang lain secara melawan hukum)terpenuhi,namun terdapat tumpang tindih dengan pembelaan perdata,mengkualifikasikan perbuatan sebagai penggelapan dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara.BAP terbukti sah sebagai bukti permulaan meski perlu didukung bukti tambahan,dengan keterlibatan saksi dan surat gugatan memperkuat kronologi kejadian antara 26 mei 2023 hingga 12 juli 2023 di kupang.implikasi hokum Smencakup potensi penyelesaian melalui jalur perdata serta rekomendasi perbaikan penyusunan BAP untuk menjamin kepastian hokum.penelitian ini memberikan kontribusi pada hukuman tindak pidana dalam melindungi bisnis di Indonesia.

Kata Kunci: Penggelapan, pasal 372 KUHP, analisis yuridis, surat perdata, berita acaara pemeriksaan.

PENDAHULUAN

Penggelapan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, baik di lingkungan bisnis,kerja sama,dan transaksi umum.Tindak pidana penggelapan diatur dalam kitab undang-undang pidana (KUHP) pada pasal 372 hingga pasal 378 KUHP.dalam merumuskan undang undang,penggelapan didefenisikan sebagai perbuatan yang sengaja menguasai barang milik orang lain secara melawan hokum dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut bagi dirinya sendiri.pengertian penggelapan dijelaskan secara luas oleh ahli bahwa penggelapan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan niat jahat dengan mengambil ahli kepemilikan barang orang lain tanpa izin.walaupun definisi penggelapan tidak disebutkan secara ekspisit,terdapat unsur-unsur delik yang diatur dengan jelas dalam KUHP.daalam praktik penegakan hokum,memberi unsur pasal penggelapan harus dibuktikan melalui proses penyidikan yang objektif dan sah,terutama dengan menggunakan berita acara pemeriksaan(BAP).BAP memiliki peran penting dalam merekonstruksi peristiwa pidana,menilai terpenuhinya unsur pasal 372 KUHP,serta menghubungkan keterangan tersangka dengan alat bukti lainnya.selain itu,penetapan tersangka tindak pidana penggelapan harus memenuhi rumusan undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut,analisis terhadap keselarasan antara definisi penggelapan secara normatif dan doctrinal dengan fakta-fakta yang terungkap dalam BAP menjadi penting untuk menilai keabsahan tersangka.selain itu,kajian mengenai peran BAP,keterangan. Tersangka,dan saksi diperluka untuk memahami suatu alat bukti agar dapat diuji dan digunakan secara sah dalam rangka menjamin kepastian hokum,keadilan serta keadilan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses pidana. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi apakah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan kronologi yang terdapat di BAP sudah memenuhi rumusan delik penggelapan dan unsur-unsur sesuai pasal yang ditetapkan,serta memberlakukan hokum dari tindakan yang dilakukan bagi tersangka penggelapan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh dari dokumen BAP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta literatur hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Faktor yang Terkait dengan Kasus BAP

- a. Pada periode 26 mei 2023 hingga 12 juni 2023, saudara Demsy Ronald Dully alias Demsy diduga terlibat dalam penggelapan bawang merah milik anung satya matani, yang dijual oleh Rano Mulyanto tanpa pengembalian hasil penjualan.
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka disertai dengan keterangan bahwa ia memperkenalkan Rano Mulyanto kepada pelapor, dan ia mengajukan gugatan perdata untuk menuntut rugi sebesar Rp 524.550.000

Analisis Kasus

Pasal penggelapan diatur secara spesifik dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) pasal 372 hingga pasal 378. dalam memenuhi rumusan undang-undang tentang pengertian penggelapan, penegakan diberikan pada unsur sengaja yang meliputi niat jahat untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. dalam hal ini, unsur subjektif (niat jahat) terpenuhi, hal ini dibuktikan dengan tersangka mengetahui perbuatan Rano Mulyanto namun tidak mencegahnya, yang membuktikan adanya itikad untuk menggambil manfaat dari penggelapan. selanjutnya, unsur objektif atau actus reus juga terbukti melalui penguasaan bawang merah yang dijual tanpa izin, yang menyebabkan kerugian bagi pemiliknya. tanpa memerlukan bukti tambahan wajib, meski idealnya dilengkapi untuk memperkuat bukti. kualifikasi sebagai penggelapan sudah tepat karena terdapat penguasaan yang melawan hukum, namun terdapat tumpang tindih dengan penegakan hukum.

Perbuatan tersangka Demsy Ronald Dully sudah memenuhi unsur pasal 372 KUHP sesuai dengan keterangan yang terdapat di dalam BAP. tersangka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 372 KUHP dengan pidana penjara 4 tahun. namun dalam hal ini, penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur perdata seperti mediasi bisnis untuk rekonsiliasi.

KESIMPULAN

Penggelapan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan memiliki bagi dirinya sendiri. rumusan delik dan unsur-unsur terkait dengan penggelapan sudah diatur secara jelas di dalam kitab undang-undang pidana (KUHP). analisis faktor-faktor yang tertuang di dalam BAP tambahan dan laporan polisi nomor: LP/B/331/IX/2023/SPKT Polda NTT menunjukkan bahwa unsur penggelapan yang dilakukan oleh tersangka Demsy Ronald Dully terpenuhi secara normatif dan doctrinal, hal ini dilihat dari unsur subjektif yakni niat jahat yakni perbuatan melawan hukum. namun, terdapat tumpang tindih dengan penyelesaian perjanjian yang harus dipertimbangkan. berita acara pemeriksaan (BAP) memiliki peran strategis dalam penyidikan tindak pidana, membangun unsur pasal sesuai perbuatan yang dilakukan, serta memperkuat keterkaitan antara alat bukti. dengan demikian, BAP menjadi instrument penting dalam membentuk keyakinan penyidik secara objektif dan sah menurut hukum.

REFERENSI

Anwar Moch HAK, 1986, hukum pidana bagian khusus (KUHP buku II) jilid 1 dan 2, Bandung: alumi.

Kitab undang-undang pidana, penerbit: PT Citra Aditya Bakti Surabaya.

Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP).

Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPERDATA).

Laporan polisi nomor: LP/B/331/XI/2023/SPKT Polda NTT

Gugatan perdata nomor 185/pdt.G/2024/PN kpg.

Diterbitkan oleh Hukum, universitas Widya Mandira Kupang, 2024

Jurnal Hukum & Pembangunan UI. (2020). "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama (Pengeroyokan) dalam KUHP."

Jurnal RechtsVinding Kemenkumham. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia."